

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, M.A, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Doko, I. H. 1974. *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Masa Baru.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: UGM University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sabir, Syafrida Hafni. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Andi.
- Santoso, Iman. 2002. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Tesis. Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
- Taufan Subeki, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal

- Bunga, Gerald Alditya, et al., “The Role of Kupang Class 1 Immigration Office in Handling Illegal Immigrants in East Nusa Tenggara,” *Unizar Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022.
- Helpiastuti, Selfi Budi, Irba Syaifana dan Hermanto Rohman, 2023, *Kualitas Pelayanan M-Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2023.

- Jerold, Suhaidi, Isnaini, “Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Lawiya, Muhammad Azhar, Salmon Eliaser Marthen Nirahua, dan Julista Mustamu, “Penerapan Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” *Lutur Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Mei 2023.
- Pratama, Reza Akbar dan Dana Alya Utami, 2023, *Efektivitas Aplikasi M-Paspor dalam Aspek Pelayanan Publik dan E-Government*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Sari, Putri Dia, Redia Annisa Al Karimah, dan Sarah Salsabilla, “Efektivitas Aplikasi M-Paspor dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 9, No. 1, April 2024.
- Suriadi, A., A. Mulyani, L. Hadiawati, dan Suratman, “Biophysical Characteristics of Dry-Climate Upland and Agriculture Development Challenges in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara Provinces,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 648, 2021.
- Syakir, “Policy of Permission of Permit to Exit Indonesia’s Region in Immigration Perspective,” *Journal of Social Science*, September 2020.
- Therik, Wilson M. A., “Kota Kupang sebagai Heritage City,” *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, Vol. 7, No. 3, September 2018.
- Yulianti, Annisa Pradita, Muhammad Arief Hamdi, dan Sohirin, “Legal Study of Public Services on Passport Rejection Decision Making Based on General Principles of Good Governance (AAUPB),” *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 1, Juni 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Kupang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Surat Edaran Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-4.0331 tentang Pelaksanaan Mobile Paspor (M-Paspor).